

## Pengaruh Pengendalian Intern, Moralitas Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud Pada Kecamatan Panakukang Kota Makassar

Nursyam AR<sup>1</sup>, Andi Musfirawati Nur<sup>2</sup>, Ardiansyah Ali<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Indonesia Timur  
Email: [ardiansyahali86@gmail.com](mailto:ardiansyahali86@gmail.com)<sup>3\*</sup>

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern, moralitas serta kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud di kecamatan Panakukang kota Makassar. Adapun populasi dalam penelitian ini yakni seluruh pegawai kecamatan Panakukang sebanyak 35 orang, dengan Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik simple random sampling, dimana dalam pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner, dengan teknik analisis data menggunakan analisis linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda yakni secara parsial dan simultan diperoleh bahwa pengaruh pengendalian intern, moralitas, dan kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pada instansi kantor kecamatan panakukang kota Makassar.

**Keyword:** Pengendalian intern, Moralitas, Kompetensi aparatur, Pencegahan fraud

### PENDAHULUAN

Secara administratif kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah di negara Indonesia di bawah Kabupaten atau kota. Sebuah Kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Di Indonesia, sebuah Kecamatan atau Kabupaten adalah pembagian dari kabupaten (Kabupaten) atau kota (Kota Madya). Sebuah Kabupaten itu sendiri dibagi menjadi kelurahan atau desa administratif. Dalam Hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan Camat.

Bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggara pemerintah yang diatur dalam UU NO.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan UU NO. 32 Tahun 2004 tentang

pemerintah daerah, upaya kongkrit yang dapat dilakukan pemerintah adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

Potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan) ini salah satu fungsi Camat, karena dalam melaksanakan tugas umum

pemerintahan dalam wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah kecamatan, dalam hal mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, kemudian penegakan peraturan perundang-undangan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan dan instansi pemerintah lainnya pada wilayah kecamatan yang dimaksud adalah dengan mengkoordinasikan dan mendorong kelancaran berbagai kegiatan ditingkat kecamatan dan penyelenggaraan tugas pemerintahan lainnya di Kecamatan.

Camat sebagai perangkat daerah dalam pemerintahan juga mempunyai dasar khusus jika dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan azas desentralisasi.

Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, dan budaya, mengupaya terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam rangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

*Good governance government dapat di artikan sebagai "Good governance is defined as a process as well as a structure that guide the political and socio economic relationships and it refers to several characteristics or indicators such as: participation, rule of law, transparency, responsiveness and accountability. Citizens' perspective of good governance is the improvement of the structure of public service and administration"* (Elahi dalam Momma Yousaf, 2015)

Dari pernyataan di atas telah di jelaskan bahwa *Good Governance* didefinisikan sebagai proses serta struktur yang membimbing politik dan hubungan sosial ekonomi dan mengacu pada beberapa karakteristik atau indikator seperti partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsif dan akuntabilitas. Perspektif warga negara dari good governance adalah perbaikan struktur pelayanan publik dan administrasi.

Akuntabilitas publik merupakan sebuah individu maupun organisasi dalam menyajikan, melaporkan, mengungkapkan, serta mempertanggung jawabkan segala aktivitas dan kegiatan yang sudah di amanatkan kepada mereka. Salah satu unsur yang penting untuk dilaporkan adalah keuangan. Akuntabilitas publik menjadi sebuah landasan utama proses penyelenggaraan pemerintah yang baik. Karena itu aparat pemerintah harus mempertanggungjawabkan keseluruhan aktivitasnya serta pelaksanaan kerjanya kepada publik.

Isu tentang korupsi di Indonesia menjadi salah satu permasalahan utama bangsa ini karena semakin marak terjadi praktek-praktek tindak korupsi. Maka dalam sebuah penganggaran partisipatif masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari tujuan.

Kecurangan (Fraud), terutama kecurangan laporan keuangan (Financial Statement Fraud) tidak hanya terjadi di sektor swasta tapi bisa juga terjadi di sektor pemerintahan dalam bentuk kesalahan penyajian material laporan keuangan.

Kecurangan laporan keuangan bertujuan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (financial engineering) (Association of Certified Fraud Examinations, 2018).

Terjadinya sejumlah kecurangan di lingkungan lembaga pemerintah daerah merupakan cerminan rendahnya moral yang dimiliki karyawan di bagian keuangan atau non keuangan pada lembaga pemerintah daerah. Dekadensi moral dan pemahaman terhadap agama yang lemah menjadi faktor penyebab terjadinya fraud dan hal ini akan menurunkan upaya pencegahan kecurangan yang dilakukan pemerintah.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2013) moral merupakan nilai kebaikan dan keburukan yang terbentuk dalam diri individu atau pelaku akuntansi yang dapat filter di dalam mengambil berbagai tindakan. Salah satu faktor penting yang dapat membentuk

moral adalah agama, keluarga, pendidikan formal dan lingkungan masyarakat.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Wahyuni (2017) yang meneliti tentang pengaruh pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan moralitas pegawai terhadap pencegahan fraud (Studi Empiris SKPD di Kabupaten Limapuluh Kota). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah hanya membahas 2 (Dua) variabel bebas yaitu terkait pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern dan moralitas terhadap pencegahan fraud sedangkan penelitian ini menggunakan 3 (Tiga) variabel bebas yaitu, pengendalian intern, moralitas, dan kompetensi aparatur

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan antar dua variabel atau lebih dalam mengetahui pengaruh pengendalian intern, moralitas, dan kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud pada kantor Kecamatan Panakukang di Kota Makassar.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Kecamatan Panakukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah 35 orang. Menurut Arikunto (2012:104) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, namun jika populasinya lebih

besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasi.

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*, dimana dalam pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Dalam mengumpulkan data dilapangan penulis menggunakan angket, wawancara serta dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis datanya menggunakan analisis regresi berganda dalam mengetahui pengaruh pengendalian intern, moralitas, dan kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud baik secara parsial maupun simultan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian akan memberikan gambaran secara statistik terhadap variabel-variabel independen dan variabel dependen, dimana untuk variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak. Sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak.

Informasi yang terdapat dalam statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi (standar deviation). Berikut ini merupakan analisis statistik deskriptif dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Minimum	Maximum	Mean	St. Deviation
Pengendalian Intern	26	35	30,46	2,430
Moralitas	18	25	22,86	1,958
Kompetensi Aparatur	12	25	21,26	2,832
Pencegahan Fraud	16	20	18,66	1,413

Pada variabel pengendalian intern, di mana terdiri dari 35 responden yang diteliti menunjukkan bahwa nilai minimum pengendalian intern sebesar 26 dan pada nilai maksimumnya sebesar 35. Pada nilai rata-rata hitung (mean) sebesar 30,46 dengan perolehan nilai standar deviasi menunjukkan sebesar 2,430.

Pada variabel penelitian Moralitas di mana terdiri dari 35 responden yang diteliti menunjukkan bahwa nilai minimum Moralitas sebesar 18 dan pada nilai maksimumnya sebesar 18. Pada nilai rata-rata hitung (mean) sebesar 22,86 dengan perolehan nilai standar deviasi menunjukkan sebesar 1,958.

Pada variabel penelitian kompetensi aparatur di mana terdiri dari 35 responden yang diteliti menunjukkan bahwa nilai minimum kompetensi aparatur sebesar 12 dan pada nilai maksimumnya sebesar 25. Pada nilai rata-rata hitung (mean) sebesar 21,26 dengan perolehan nilai standar deviasi menunjukkan sebesar 2,832.

Pada variabel penelitian pencegahan fraud di mana terdiri dari 35 responden yang diteliti menunjukkan bahwa nilai minimum pencegahan fraud sebesar 16 dan pada nilai maksimumnya sebesar 20. Pada nilai rata-

rata hitung (mean) sebesar 18,66 dengan perolehan nilai standar deviasi menunjukkan sebesar 1,413.

Untuk analisis regresi berganda pada penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	15,371	3,425		4,488	,000
Pengendalian Intern	,089	,140	,154	,636	,530
Moralitas	,105	,164	,146	,642	,526
Kompetensi Aparatur	-,087	,116	-,174	-,745	,462

Berdasarkan tabel diatas maka uraian model estimasinya sebagai berikut:

$$Y=15,371+0,089X_1+0,105X_2-0,087X_3$$

1. Pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini dapat dilihat dari variabel pengendalian intern memiliki t hitung < tabel t, yaitu t hitung sebesar 0,636 sementara pada t tabel untuk sig.  $\alpha = 0,05$  dan  $df = n-k$  ( $35-4 = 31$ ) yakni sebesar 2,0395 dengan tingkat signifikan 0,530 di mana lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima. Hal ini berarti bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.
2. Variabel moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini dapat dilihat bahwa variabel kewajiban moral memiliki t hitung < tabel t, yaitu t hitung sebesar 0,642 sementara pada t tabel untuk sig.  $\alpha = 0,05$  dan  $df = n-k$  ( $35-4 = 31$ ) yakni sebesar 2,0395 dengan tingkat signifikan 0,526 di mana lebih

besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima. Hal ini berarti bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.

3. Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini berdasarkan dari table diatas bahwa variabel kompetensi aparatur memiliki t hitung < tabel t, yaitu t hitung sebesar -0,745 sementara pada t tabel untuk sig.  $\alpha = 0,05$  dan  $df = n-k$  ( $35-4 = 31$ ) yakni sebesar 2,0395 dengan tingkat signifikan 0,462 di mana lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima. Hal ini berarti bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.

### Uji Hipotesis

#### Uji F (Simultan)

Uji Simultan (Uji F) di gunakan untuk mengetahui apakah variable bebas secara serentak berpengaruh terhadap variable terikat, dimana jika F hitung > F tabel atau jika nilai sig < 0,05, maka hasil dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara simultan.

Tabel 3. Uji F

Model	ANOVA <sup>a</sup>				
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2,776	3	,925	,441	,726b
Residual	65,110	31	2,100		
Total	67,886	34			

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil f hitung sebesar 0,441 dengan tingkat signifikansi 0,726 yang lebih kecil dari 0,05.

Perolehan tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 5% ( $\alpha=0,05$ ) dan nilai F-hitung sebesar 0,441 lebih kecil dari nilai F tabelnya sebesar 3,30 ( $df_1= 4-1 =3$  dan  $df_2 = 35-4 = 31$ ). Hal ini berarti bahwa variabel pengendalian intern, moralitas dan kompetensi aparatur tidak mempengaruhi pencegahan fraud di Kantor Kecamatan Panakukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

### Uji T (Parsial)

Variabel engendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud Hasil pengujian hipotesis ( $H_0$ ) ini menunjukkan bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pada instansi kantor kecamatan panakukang kota Makassar. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Nurul wahyuni (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pada instansi kantor kecamatan panakukang kota makassar.

Variabel moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hasil pengujian hipotesis ( $H_0$ ) ini menunjukkan bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pada instansi kantor kecamatan panakukang kota makassar. variabel moral memiliki t hitung < tabel t, yaitu t hitung sebesar 0,642 sementara pada t

tabel untuk sig.  $\alpha = 0,05$  dan  $df = n-k (35-4 = 31)$  yakni sebesar 2,0395 dengan tingkat signifikan 0,526 di mana lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima. Hal ini berarti bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan Nurul wahyuni (2017) yang menyatakan bahwa moralitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pada instansi kantor kecamatan panakukang kota makassar.

Variabel kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hasil pengujian hipotesis ( $H_0$ ) ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pada instansi kantor kecamatan panakukang kota makassar. variabel kompetensi aparatur memiliki t hitung < tabel t, yaitu t hitung sebesar 0,745 sementara pada t tabel untuk sig.  $\alpha = 0,05$  dan  $df = n-k (35-4 = 31)$  yakni sebesar 2,0395 dengan tingkat signifikan 0,462 di mana lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima. Hal ini berarti bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Imran yunus (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Sedangkan berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur

tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pada instansi kantor kecamatan panakukang kota Makassar.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pengujian secara parsial untuk variabel pengendalian intern, Moralitas serta kompetensi aparatur tidak adanya pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini dikarenakan masing-masing nilai variabel signifikannya  $< 0,05$  yang menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima. Kemudian untuk pengujian secara simultan pada variabel pengendalian intern, moralitas, dan kompetensi aparatur secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dikarenakan tingkat signifikan  $0,726$  yang lebih kecil dari  $0,05$ .

### UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

Association of Certified Fraud Examiner Indonesia Chapter. (2017). *Survai Fraud Indonesia*. ACFE Indonesia Chapter. Indonesia.

Bachtiar Halimah dan Elliyana. (2020). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*. Universitas Indonesia Timur Vol 5 No.2.

Chapter, A. I. (2016). *Survai Fraud Indonesia*. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia*.

Edy Sutrisno. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetak Ke Enam: Pranada Media Group. Jakarta.

Fahmi, Irham. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta

Fahmi, Irham. 2014. *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung : Alfabeta

Fuad, K. (2015). *Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Prosedur Audit Terhadap Tanggung Jawab Dalam Pendeteksian Fraud* *Jurnal Dinamika Akuntansi*. ggal 20 November 2020.

Hery, (2014). *Akuntansi Dasar 1 & 2*. Cetakan Pertama. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Iqbal, Muhammad. 2010. *Pengaruh Tindakan Pencegahan, Pendeteksian, dan Audit Investigatif Terhadap Upaya Meminimalisasi Kecurangan Dalam Laporan Keuangan*, Skripsi Akuntansi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Karyono. (2013). *Forensic Fraud* Yogyakarta: CV Andi

Kurniawan, Gusnardi. (2013). *Pengaruh Moralitas, Motivasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan*. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri, Padang*.

Robbins, Stephen P & Judge, Timothy A. (2013). *Organizational Behavior* Edition 15. New Jersey: Pearson Education

Romney, Marshall B dan Steinbart. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 13, alih bahasa: Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari, Salemba Empat. Jakarta.

Simanjuntak, Ridwan. (2008). *Pengertian Pencegahan Kecurangan*. Seri Departemen Akuntansi: FEUI.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2014). Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing). Salemba Empat. Jakarta.
- Tunggal, A. W., & Tunggal, A. W. (2012). Audit kecurangan dan akuntansi forensik. *Harvarindo, Jakarta*.
- Velasquez, Manuel G. (2005). Etika Bisnis: Konsep dan Kasus (Edisi Ke-5). (Ana Purwaningsih, Kurnianto, dan Totok Budi Santoso). Yogyakarta: Penerbit Andi
- Wardana, Sujana, dan Wahyuni. (2017). E-Journal S1 Ak Universitas pendidikan Ganesha vol. 8 No.2..
- Wibowo. (2012). Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wibowo. 2014. Manajemen Kinerja. Edisi Keempat. Jakarta: Rajawali Pers.